

Katy Gardner & David Lewis

**Antropologi,
Pembangunan
& Tantangan
Pascamodern**

Pengantar: Dr. Philipus Tule, SVD

PENERBIT LEDALERO



KATY GARDNER & DAVID LEWIS

**ANTROPOLOGI,
PEMBANGUNAN
dan
TANTANGAN
PASCAMODERN**

PENGANTAR:
DR. PHILIPUS TULE



Penerbit Ledalero
Maumere 2005

PL 3-021-05

Katy Gardner & David Lewis, Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern.

Aslinya: Anthropology, Development and the Post-modern Challenge, Pluto Press, London, Sterling, Virginia, 1997

Terjemahan: Yosef M. Florisan

© Penerbit Ledalero

Seminari Tinggi Ledalero

Maumere 86152

Tel. (0382) 21893 Fax (0382) 21892

e-mail: penerbitledalero@yahoo.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit Ledalero.

Cetakan I: April 2005

Cover Design: Febuarto Victor Dachi

Dicetak oleh Percetakan Galangpress

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Gardner Katy dan David Lewis,

Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern – terjemahan Yosef Maria Florisan – Cet. I – Maumere: Penerbit Ledalero, 2005. – xxxviii + 309 hlm, 14.8 x 21 cm.

ISBN: 979-9447-81-X

1. Antropologi Budaya, 2. Pembangunan, 3. Ilmu Sosial I. Judul. II. Florisan Yosef Maria

DAFTAR ISI

Pengantar	vii
Prakata Penulis	xxiii
Ucapan Terima Kasih	xxvii
Daftar Istilah	xxix
Singkatan	xxxvii
1 ANTROPOLOGI, PEMBANGUNAN DAN KRISIS ZAMAN MODERN	1
2 ANTROPOLOGI TERAPAN – LATAR BELAKANG HISTORIS	43
3 ANTROPOLOGI TENTANG PEMBANGUNAN	81
4 MEMBETOT ARAH WACANA – PENGETAHUAN DAN PRAKTIK	127
5 ARAH-ARAH BARU – PRAKTIK DAN PERUBAHAN	171
6 PARA ANTROPOLOG DALAM PEMBANGUNAN	213
7 DI SEBERANG PEMBANGUNAN?	253
Catatan	281
Daftar Kepustakaan	289

PENGANTAR

PEMBANGUNAN BERBASIS BUDAYA: SEBUAH TINJAUAN ANTROPOLOGIS

Oleh Dr. Philipus Tule, SVD

Pendahuluan

Dalam dasawarsa terakhir ini, peran para antropolog semakin dinilai strategis dalam aktivitas pembangunan. Hal itu tampak dalam aneka fenomena, antara lain: semakin banyak antropolog yang dilibatkan sebagai konsultan dalam pelbagai proyek pembangunan. Segelintir antropolog bekerja sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) demi pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan serta dalam kegiatan advokasi bagi masyarakat pinggiran. Trend baru dalam ilmu antropologi itu sesungguhnya searah dengan apa yang dikenal dengan sebutan "antropologi terapan".

Dalam pengantar buku ini disingkapkan peran antropologi bagi pembangunan umumnya, yang diawali dengan bahasan tentang antropologi terapan dan pembangunan, pergeseran orientasi nilai, perubahan sosial budaya yang menggugat teori pembangunan, dan paradigma baru pembangunan.

Antropologi terapan dan pembangunan

Kata antropologi berasal dari kata bahasa Yunani *anthropos* (manusia) dan *logos* (kata atau wacana). Antropologi berarti studi tentang manusia atau ilmu tentang manusia. Namun hal itu bisa salah

kaprah, karena ilmu-ilmu lain seperti politik, sejarah, psikologi dan biologi pun memiliki objek kajian tentang manusia. Karena itu kita perlu memperjelas definisi tersebut. Kroeber mendefinisikan antropologi sebagai studi tentang manusia dengan karya-karya dan tingkah lakunya (Kroeber, 1948:1). Lebih lengkap dari definisi Kroeber, antropologi dewasa ini tidak lagi membatasi studinya pada aspek khusus manusia, tetapi terfokus pada dimensi yang holistik atau total: manusia pada umumnya, dalam segala aspek, di segala tempat dan sepanjang sejarah dari dahulu hingga kini (Luzbetak, 1963:23-24).

Jikalau para filsuf mendefinisikan manusia sebagai *rational animal*, maka baik antropologi ragawi maupun antropologi budaya, coba mengumpul kedua aspek manusia itu secara lebih spesifik. Cabang yang satu mengarahkan perhatian pada manusia sebagai suatu organisme fisik, sedangkan yang lain mengarahkan studinya pada aspek budaya. Tidak seperti *animal* (binatang) lainnya, manusia sanggup menciptakan peralatan dalam arti sesungguhnya. Hanya manusia yang memiliki organisasi ekonomi, sosial dan politik. Hanya manusia yang menganut dan mempraktikkan agama dan kepercayaan. Hanya manusia yang memiliki bahasa.

Bagi para pakar Amerika, antropologi fisik (*physical anthropology*) dan antropologi budaya (*cultural anthropology*) merupakan dua cabang antropologi yang berkaitan erat karena mengkaji manusia yang sama sebagai totalitas. Sedangkan para pakar Eropa Kontinental memandang kedua cabang itu sebagai terpisah. Antropologi fisik didefinisikan sebagai ilmu atau pengetahuan komparatif mengenai manusia sebagai organisme fisik dalam kaitan dengan lingkungannya yang total, sosial dan fisik (Mongtagu, 1951: ix; Luzbetak, 1963:25). Sedangkan antropologi budaya menganalisis dan membandingkan pola hidup manusia, baik yang hidup maupun yang telah tiada, menafsir cara hidup mereka dalam perspektif historis, lalu menetapkan hukum-hukum tingkah lakunya. Dewasa ini, antropologi budaya terbagi lagi

ke dalam studi-studi yang lebih spesifik, seperti etnomusikologi, mitologi, kesenian tradisional, pengobatan tradisional, geografi dialek, hukum adat, dll, yang semuanya bisa digolongkan dalam ketiga bidang utama ini: arkeologi pra-historis, linguistik dan etnologi (Hoebel, 1958:7-13; Keesing, 1958:4-6).

Sesudah Perang Dunia II, konsep proyek menjadi isu sentral dalam aktivitas pembangunan, entah terfokus pada karya infrastruktur berskala besar seperti pembangunan jembatan dan dam, maupun berskala kecil seperti proyek kesehatan dan pendidikan. Dewasa ini, isu keberpihakan atau advokasi demi pembelaan masyarakat marginal atau pinggiran semakin menguat. Itulah yang dikenal dengan nama antropologi terapan.

Antropologi terapan memiliki sasaran dan premis-premis praktis sebagai berikut:

1. Mengklarifikasi secara lebih serius dalam arti kultural makna teori, khususnya teori pembangunan dengan aneka konsekuensi kultural yang kontekstual.
2. Meramalkan dan mengantisipasi sejauh mungkin hasil-hasil kegiatan pembangunan serta menganjurkan pelbagai kebijakan baru yang lebih efektif dalam konteks budaya lokal.
3. Sebagaimana halnya ilmu terapan lain, ia terarah pada sejenis "intervensi" di mana antropologi seolah-olah disewa untuk berkarya demi kesejahteraan masyarakat, perkembangan dan kemajuan teknologis, perbaikan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat, demi kesejahteraan duniawi (ekologis) dan keselamatan eskatologis (spiritual). Oleh karena itu, antropologi terapan sering disebut "antropologi aksi" sebagai "mesin sosial".

Pergeseran orientasi nilai

Pada akhir dasawarsa 1960-an Prof. Koentjaraningrat¹ mulai memperkenalkan di kalangan ilmuwan sosial Indonesia konsep nilai budaya atau orientasi nilai budaya, yang sesungguhnya dipinjam dari konsep *value orientation* (orientasi nilai) yang diperkenalkan Florence R. Kluckhohn dan F.L. Strodbeck dalam buku berjudul *Variations in Value Orientation* (1961). Konsep *value orientation* itu berasal dari konsep *value* (nilai) dalam konteks *theory of action* (teori aksi) yang dikembangkan para ilmuwan sosial Amerika yang bermarkas di Harvard University pada dasawarsa 1940-1960. Para pelopor *theory of action* ini antara lain Talcot Parsons, Edward Shills, Gordon Allport, Henry Murray, dan Clyde Kluckhohn yang adalah suami Florence Kluckhohn.

Clyde Kluckhohn, dkk mendefinisikan *value* sebagai:

Sebuah konsepsi tentang sesuatu yang seharusnya diinginkan, eksplisit atau implisit, yang khas milik seorang individu atau suatu kelompok, yang mempengaruhi pilihan terhadap bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuan-tujuan tindakan yang ada (1965).

Patut disadari bahwa nilai itu hanya dapat disimpulkan dan ditafsirkan dari ucapan, perbuatan dan materi yang dibuat manusia, karena ucapan, perbuatan dan materi itu adalah manifestasi dari nilai. Seorang peneliti, tidak hanya mengamati, mencatat ucapan, perbuatan dan materi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dari aspek luarnya, tetapi harus pandai mengorek dan menemukan konsepsi yang tersembunyi di bawah permukaannya. Metode penyimpulan dan penafsiran dalam kajian tentang nilai seperti itu dikenal sebagai metode *verstehen* (memahami) dan *erklären* (menerangkan).

Perubahan sosial budaya yang menggugat teori pembangunan

Di atas telah dikemukakan sebuah teori yang agak universal tentang orientasi nilai. Namun bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mengintrospeksi diri dan menakar kebijakan pembangunan masyarakat Indonesia dalam beberapa dekade yang lalu menurut perspektif antropologi budaya? Karena itu, baiklah kita pahami dahulu definisi kebudayaan.

Antropolog Kroeber dan C. Kluckhohn, pernah mengumpulkan banyak definisi tentang kebudayaan yang pernah ditulis. Paling sedikit telah ada 160 buah definisi yang kemudian dianalisis, dicari latar belakang, prinsip, dan intinya serta diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe definisi. Hasil analisis atas aneka definisi kebudayaan itu diterbitkan dalam buku berjudul: *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (1952). Menurut ilmu antropologi, "kebudayaan"² adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik manusia lewat proses belajar (Koentjaraningrat, 1990:180).

Karena kebudayaan itu dicapai lewat proses belajar yang dilakukan secara terus menerus dan seumur hidup (*life-long learning process*), maka pembangunan pun sebagai satu aktivitas manusia berbudaya harus terjadi dalam proses bersinambung. Pembangunan dan kebudayaan memiliki relasi timbal balik. Secara lebih kontekstual, nilai dan konsep kebudayaan sangat berpengaruh atas sukses dan gagalnya pembangunan. Oleh sebab itu, teori-teori pembangunan perlu dikaji ulang dalam perspektif antropologis.

Kedua pakar antropologi sosial, Katy Gardner dan David Lewis, telah merajut aneka pengalaman praktis, hipotesis dan teori-teori mereka tentang pembangunan berdimensi antropologis secara cukup komprehensif dalam buku ini. Keduanya tidak mengklaim bahwa para antropolog sanggup menyelamatkan pembangunan. Namun keduanya

yakin bahwa para antropolog dan praktisi pembangunan dapat bekerja sama dan belajar satu sama lain demi pembangunan lewat penerapan teori-teori pembangunan yang tepat sasaran. Dua teori pembangunan dibahas cukup terperinci dalam buku ini.

Teori modernisasi (*modernisation theory*)

Teori modernisasi cukup berpengaruh atas aktivitas pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an, karena kebanyakan pakar ekonomi pembangunan masa itu menggantungkan harapan besar pada janji-janji modernisasi. Sebagaimana Norman Long rumuskan bahwa "modernisasi meragakan pembangunan dalam bingkai kemajuan progresif ke arah bentuk-bentuk masyarakat "modern" yang secara teknologis lebih kompleks dan terpadu" (Long and Long, 1992:18; lihat buku ini, hlm. 19).

Kunci sukses ke arah proses modernisasi adalah terciptanya masyarakat industri, yang beralih dari pola pertanian subsisten menuju tanaman perdagangan (*cash-cropping*), dan selanjutnya bersifat urban. Modernisasi pada hakikatnya bersifat evolusioner karena bangsa-bangsa dipandang bergerak secara linear menuju tahap industri, urban dan tertata baik. Tekanan diberikan pada rasionalitas, baik dalam arti ekonomi maupun moral. Dalam modernitas, masyarakat sedang berkembang dilihat sebagai sekular, universal dan berorientasi untung. Masyarakat terkebelakang dipandang sebagai yang berpegang pada tradisi, partikularistik dan tak berorientasi keuntungan.

Paham demikian berakar pada politik ekonomi abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang berusaha menteorikan perubahan sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan industrialisasi. Model Durkheim tentang sebuah masyarakat organik industri, pemikiran Simmel mengenai ekonomi uang, dan diskusi Weber mengenai hubungan antara Protestantisme dan kapitalisme industri merupakan contoh yang baik. Pada masa akhir ini, ekonom W.W. Rostow melukiskan konsep

modernisasi *par excellence*. Dalam karya-karyanya tentang pertumbuhan ekonomi, bentuk-bentuk pertumbuhan yang telah dialami di Utara diambil Rostow sebagai model untuk bagian dunia yang lain (Rostow, 1960a; 1960b).

Jikalau kita percaya bahwa kehidupan umumnya lebih baik di negara-negara Utara daripada Selatan, maka modernisasi merupakan konsep inheren yang optimistik, karena hal itu mengandaikan bahwa semua negara akan mengalami fase pertumbuhan ekonomi. Optimisme ini hendaknya dimengerti dalam konteks historis bahwa ada sukses dan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada era pasca-Perang Dunia II di Utara, dan ada kebergantungan negara-negara bekas jajahan di Selatan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Negara-negara yang baru merdeka percaya bahwa dengan bantuan kecil, pembangunan akan berjalan baik. Oleh karena itu, dengan gencar mereka melancarkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Tahap Pertama seperti India pada tahun 1951, Tanzania pada tahun 1964 dan Indonesia pada tahun 1966.

Teori modernisasi pun dipandang optimistik dan relatif mudah. Keteringgalan pembangunan coba dicari pada aneka "kendala", misalnya infrastruktur yang tak memadai, ketiadaan modal, manajemen yang lemah dan korup, kekurangan tenaga ahli lokal, dan lain-lain. Solusinya langsung ke sasaran yakni pembangunan jalan, jembatan dan aneka sarana yang lain dengan keterlibatan modal serta tenaga ahli asing, pelatihan tenaga teknis dan birokrat lokal, sebagaimana dilakukan oleh *British Overseas Development Administration* sejak 1980-an. Strategi lain adalah dengan mengintroduksi teknologi informasi yang baru kepada institusi lokal ataupun pelatihan tenaga lokal untuk menggunakan teknologi baru. Dalam kedua skenario ini, segenap perubahan dipandang sebagai suatu *conditio sine qua non* untuk sebuah negara atau wilayah agar bisa *take-off*. Para praktisi pembangunan memainkan peran utama sebagai *trouble-shooters*, yang menetapkan sejuta

kebijakan untuk meraih "kemajuan" (bdk. Long, 1977; lihat buku ini, hlm. 21-22).

Sejak 1960-an telah dilakukan pelbagai usaha dari negara donor untuk meretas jalan bagi negara-negara miskin untuk *take-off*. Namun pertumbuhan ekonomi di pelbagai negara tetap saja memprihatinkan. Tingkat kemiskinan tak berubah, malahan memburuk. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan teori pembangunan yang simplistik itu tidak memadai. Modernisasi, baik sebagai teori maupun strategi, tetap rentan kritik dari aneka sudut tinjauan. Asumsi bahwa semua perubahan mengikuti model Barat adalah sangat etnosentris dan secara empiris tak benar. Itulah kenyataan yang ditolak oleh antropologi dewasa ini. Sesungguhnya, riset antropologis senantiasa membuktikan bahwa pembangunan ekonomi terlaksana dengan aneka cara, tanpa menggeneralisasi transisi dari satu "tipe masyarakat" ke tipe yang lain. Teori-teori modernisasi yang mengasumsikan bahwa budaya lokal, pola pikir dan pola hidup tradisional adalah kendala pembangunan juga tidak benar. Kendatipun irasional menurut penilaian masyarakat Barat, masyarakat di negara-negara miskin juga terbuka untuk perubahan seandainya mereka memahami arah pembangunan itu. Mereka sering lebih paham daripada para perencana pembangunan bagaimana strategi mengatasi aneka masalah lingkungan. Oleh karena itu, kearifan lokal dan kebudayaan lokal seyogianya dihargai, bukannya diremehkan dan dipandang sebagai kendala pembangunan. Para antropolog seperti Mair (1984) dan Hill (1986) secara terperinci membuktikan bahwa "pemahaman tentang budaya lokal merupakan hal yang sangat penting bagi proyek-proyek pembangunan agar lebih tepat sasaran" (lihat buku ini, hlm. 23).

Modernisasi juga mengabaikan pelbagai implikasi politis dari pertumbuhan di tingkat mikro. Premis *trickle down* yang berasumsi bahwa sekali pertumbuhan ekonomi dicapai, maka segenap masyarakat akan menikmati hasilnya juga tak mutlak benar. Para antropolog dan sosiolog membuktikan bahwa kehidupan ini tidak sedemikian

mudah dan sederhana. Malahan di negara maju, seperti Australia, tingkat kemiskinan pun tetap ada (Mosley, 1987:155). Yang paling menyedihkan ialah bahwa teori modernisasi tidak membedakan antara aneka kelompok dalam masyarakat, karena diasumsikan bahwa warga masyarakat itu homogen.

Teori ketergantungan (*dependency theory*)

Bertolak dari konsep Marxis tentang kapitalisme yang bersifat eksploitatif, para penganut teori ketergantungan berargumentasi bahwa pembangunan adalah proses yang pada hakikatnya tak pernah sukses menciptakan kesetaraan. Negara-negara kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Sebagaimana kebanyakan analisis Marxis, para penganut teori ketergantungan itu berorientasi pada aspek historis dan cenderung memfokuskan perhatian pada struktur politik yang mendominasi suatu bangsa. Mereka berargumentasi bahwa bangsa-bangsa yang tertinggal dalam pembangunan disebabkan oleh proses eksploitasi imperial dan post-imperial. Model yang dipakai untuk menjelaskan proses ini adalah ide "pusat" (*centre*) dan "pinggiran" (*periphery*), yang menampilkan "negara-negara Utara" sebagai *centre* kapitalisme, dan "negara-negara Selatan" sebagai *periphery*. Lewat penjajahan, kekuatan ekonomi *peripheral (marginal)* diintegrasikan dalam kapitalisme, namun di atas basis yang tak setara. Dengan pengadaan bahan-bahan mentah (*raw-materials*) guna memenuhi kebutuhan industri di pusat, bangsa atau wilayah pinggiran menjadi bergantung pada pasar asing serta gagal membangun basis industri sendiri. Pembangunan infrastruktur demi kemudahan aktivitas ekspor bangsa penjajah. Dalam banyak aspek, ekonomi akhirnya hanya bergantung pada suatu sumber produksi tunggal (Wallerstein, 1974).

Struktur ketergantungan itu pun terjadi dalam level nasional. Sebagaimana pada taraf internasional "pusat" mengeksploitasi "pinggiran", demikian halnya terjadi di negara sedang berkembang, di mana metro-

politik mengeksploitasi masyarakat pinggiran. Masyarakat pinggiran juga dieksploitasi oleh para elite lokal lewat jaringan kolusi yang kuat dengan elite pusat, baik politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, teori ketergantungan senantiasa bernuansa negatif, karena merupakan:

suatu situasi berkelanjutan di mana tatanan perekonomian satu kelompok negara dikondisikan oleh pembangunan dan ekspansi kelompok negara lainnya. Relasi saling ketergantungan di antara dua atau lebih tatanan perekonomian, atau antara tatanan perekonomian itu dan sistem perdagangan dunia menjadi suatu relasi ketergantungan ketika beberapa negara bisa melakukan ekspansi melalui dorongan sendiri, sedangkan negara-negara lain, karena berada pada posisi ketergantungan, hanya mampu berkembang sebagai pantulan dari ekspansi negara-negara dominan, yang bisa saja berdampak positif atau negatif terhadap posisi langsung mereka (Dos Santos, 1973; lihat buku ini, hlm. 26).

Gugurnya kedua teori pembangunan

Pada awal tahun 1990-an tak satu pun dari kedua teori itu bertahan sebagai paradigma pembangunan yang tepat. Secara politis, sejak akhir 1980-an polarisasi dunia atas dasar "konsep Perang Dingin" (antara kapitalisme dan komunisme) sudah ketinggalan zaman. Para ahli mulai berdiskusi mengenai "Tata Dunia Baru". Orang tak lagi percaya pada jargon seperti "dunia ketiga", "dunia pertama", dan "dunia kedua", karena batas-batasnya tak jelas. Dalam tata dunia baru, tak mudah ditemukan batas-batas antara negara pusat dan negara-negara pinggiran. Kemajuan ekonomi Asia Timur misalnya, telah menggugat dan mengambil alih pusat-pusat kapitalisme tradisional di Amerika Utara dan Eropa, sekaligus meruntuhkan teori ketergantungan. Oleh sebab itu, kita mulai berbicara tentang "pascamodernisme" dan "antropologi pembangunan".

Pascamodernisme dan antropologi pembangunan

Sejak tahun 1990-an kita memasuki era pascamodernisme. Meski punya aneka makna, term ini sering didefinisikan secara sederhana sebagai suatu penolakan kultural dan intelektual terhadap modernitas. Secara antropologis, tendensi pascamodernisme di negara-negara Utara dapat ditelusuri kembali ke tahun 1940-an dan 1950-an, di kala seni telah bergerak jauh melampaui modernisme ke area yang lebih luas, lebih jamak dalam gaya dan teknik seperti: eklektisisme dan aneka bentuk multimedia. Batas antara budaya "tinggi" dan "rendah" musnah. Secara filosofis, pascamodernisme meruntuhkan dominasi teori-teori pembangunan yang tunggal serta pemujaan akan rasionalitas ilmu pengetahuan. Kebenaran "objektif" telah diganti oleh penghargaan akan lambang-lambang, lukisan-lukisan serta keanekaan sudut pandang. Tidak ada kebenaran mutlak dan objektif sebagai realitas tunggal. Setiap orang memiliki persepsi yang unik. Pascamodernisme cenderung terbuka dan mendengar suara-suara lokal dan mendekonstruksi apa yang telah diperkatakan para pakar asing.⁷

Sebagaimana pendekatan pascamodernisme memperlakukan konsep dan teori pembangunan, demikian halnya dalam dunia antropologi (Grimshaw and Hart, 1993). Sejak tahun 1980-an dunia antropologi menganut beberapa tendensi pascamodern. Relativisme budaya, sebagai tema dalam antropologi pembangunan, mendesak pengakuan akan kearifan lokal. Hal ini muncul sebagai reaksi atas fenomena lama: generalisasi ahistoris berdasarkan observasi objektif para antropolog yang mewarnai karya-karya etnografi klasik dan mengaburkan heterogenitas budaya lokal. Paradigma teoretis seperti fungsionalisme⁸ dan strukturalisme mempengaruhi cabang-cabang antropologi hingga tahun 1970-an. Oleh sebab itu, para antropolog mutakhir (1980-an) mulai giat dengan antropologi pembangunan yang menggugat pelbagai paradigma antropologis klasik yang cenderung mengobjektifikasi "masyarakat dunia ketiga". Wacana dan paradigma

antropologi klasik itu tidak netral, tetapi terperangkap dalam percaturan *power relations* antara Utara dan Selatan, atau antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga.⁵

Lebih tandas dari itu, Rabinow (1986:259) mengungkapkan bahwa salah satu solusi atas "krisis representasi" yang dialami dunia antropologi itu adalah "belajar ke atas" (*to study up*) dan membuat riset tentang "orang-orang kuat" (*the powerful*) daripada tentang "orang-orang lemah" (*the powerless*). Oleh karena itu, dalam koridor paradigma antropologi pembangunan ini, kegagalan pembangunan tidak saja dicari kendalanya pada "lapisan bawah" atau "masyarakat lokal", tetapi juga "lapisan atas" yakni: para penguasa, negara-negara donor, oknum pejabat pemerintah, oknum pemilik LSM, dan para agen pembangunan.

Paradigma baru pembangunan

Dalam rentangan sejarah pembangunan telah diterapkan aneka pola pendekatan yang dipandang tepat guna oleh setiap pimpinan nasional Indonesia. Secara sangat ringkas kebijakan pembangunan nasional kita dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a). Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada masa itu Presiden Soekarno dan kabinetnya memberikan penekanan lebih pada pembangunan nilai-nilai politik daripada ekonomi. Sasarannya adalah pengembangan sebuah masyarakat sosialisme Pancasila, negara Kesatuan RI yang kokoh di hadapan mata internasional, kehidupan bersama yang damai, toleran dan setia pada bangsa dan negara. Para buruh dan tani, masyarakat kecil dan pinggiran menjadi andalan atau soko guru revolusi bangsa Indonesia masa itu.
- b). Zaman Orde Baru (1966-1996). Presiden Soeharto dan kabinetnya masa itu menekankan nilai ekonomi dan peningkatan produksi. Kaum buruh dan tani dijadikan alat produksi untuk mengejar per-

tumbuhan ekonomi yang sangat gencar dicanangkan lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

- e). Zaman Kabinet Reformasi dan Kabinet Indonesia Bersatu (1996-2005). Pada masa itu, Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan kini Susilo Bambang Yudhoyono berusaha keras merajut kembali benang-benang kusut yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan ekstrem politik dan ekonomi yang dilakukan rezim Orde Lama dan Orde Baru.

Pada setiap periode pembangunan itu, partisipasi para agen pembangunan, khususnya dari lingkup Perguruan Tinggi dan LSM sangat strategis lewat persiapan yang matang agar benang-benang kusut pembangunan bangsa dalam segala aspeknya dapat dirajut kembali sehingga mampu berkompetisi dalam percaturan dunia yang dilanda arus globalisasi. Untuk itu, dibutuhkan agen pembangunan: para dosen dan pakar politik, para pakar ekonomi dan antropologi yang berkualitas unggul *the world class* dan "berdaya kontekstual". Menurut Rosabeth Moss Kanter, *the world class* adalah sebuah ungkapan yang menggarisbawahi dua aspek. Pertama, mengejar standar tertinggi dalam bidang apa saja agar mampu berkompetisi. Kedua, pertumbuhan kelas sosial yang berciri memiliki kemampuan mengelola aneka sumber daya dan memfungsikannya hingga melampaui batas-batas nasional (Kanter, 1995:22).

Clive Morton mengelaborasi lagi aspek pertama di atas dalam konteks dunia usaha, ketika ia menekankan bahwa suatu organisasi bisnis bertaraf dunia hendaknya memusatkan perhatian pada tiga hal berikut: kualitas, biaya dan ketepatan waktu (Morton, 1994:97-98). Dalam alur yang senada, Jackson dan Frigon menegaskan bahwa "agar bisa ikut bersaing dalam tataran dunia, peserta bisnis harus mengakumulasi modal atas faktor-faktor yang bisa dinilai dari kualitas, biaya dan perencanaan waktu (Jackson and Frigon, 1996:153).

Lebih lanjut Kanter menjelaskan aspek kedua itu dengan mengidentifikasi kelas sosial baru sebagai yang kosmopolitan, yang berbeda dengan yang lokal. Yang kosmopolitan itu dikatakannya bersifat kaya karena memiliki tiga C yakni *Concept*, *Competence* dan *Connections* yang memampukan orang ikut dalam percaturan ekonomi global. *Concept* berarti memiliki pengetahuan dan ide terbaik dan mutakhir. *Competence* berarti daya atau kemampuan mengoperasikan dan mengimplementasikan pengetahuan dan ide-ide tersebut di pelbagai tempat dan waktu. *Connections* berarti kemampuan membina relasi dan jaringan yang memungkinkan akses pada sumber daya dan organisasi lain di seluruh dunia (Kanter, 1995:23).

Para agen pembangunan telah bekerja keras dewasa ini: Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, para pakar dari aneka disiplin ilmu termasuk antropologi dan ekonomi. Namun realitas tetap menunjukkan adanya kemiskinan, kesenjangan sosial, ketertinggalan dalam aneka bidang kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dijawab bila kita mau merevisi kebijakan pembangunan. Sejauh mana para agen pembangunan itu bertanggung jawab kepada rakyat atau masyarakat yang mereka wakili ataupun layani? Sejauh mana efisiensi kerja para agen pembangunan dalam realitas? Apakah mereka lebih baik dari agen pembangunan lain karena memiliki modal lebih proporsional demi tugas-tugas yang diemban? Apakah mereka cenderung mereproduksi relasi patronasi di tataran lokal dengan bersikap sebagai leveransir-leveransir baru dari sumber daya negara di tingkat pedesaan? Ataupun mereka lebih memperlemah negara dan melanggengkan kelemahan itu dengan menarik segelintir staf dan sumber daya lainnya dari negara?

Dalam kerangka orientasi baru, tugas para agen pembangunan dan subjek Perguruan Tinggi pada masa ini adalah melibatkan diri secara lebih kritis dalam aneka wacana pembangunan. Secara temporer ataupun tetap mereka diharapkan memberi masukan dan mem-

pengaruhi lembaga-lembaga donor dan pemerintah selagi mereka membangun. Sejalan dengan orientasi baru itu, aneka terminologi pembangunan yang cenderung mengobjekkan masyarakat miskin dan marginal, yang sesungguhnya adalah subjek pembangunan itu sendiri, berlakunya dihilangkan dan diganti dengan terminologi seperti partisipasi, *agency*, kegiatan pembangunan partisipatif, pemberdayaan, yang sinonim dengan: memelihara atau mengasuh (*nurturing*), membebaskan (*liberating*), dan memberdayakan (*energising*) kaum miskin dan tak berdaya lewat beberapa bentuk pengembangan masyarakat (*community development*), a.l: Perempuan dalam Pembangunan atau *Women in Development*, Gender dan Pembangunan atau *Gender and Development*, Kepala Keluarga Perempuan atau *Female-headed Households*, Gerakan dari Budaya Pertanian Menuju Budaya Perairan atau *From Agriculture to Aquaculture* (Black, 1991:21).